

Judul : Polemik UU MD3: DPR Siap Patuhi Hasil Putusan Uji Materi di MK
Tanggal : Senin, 19 Maret 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

== POLEMIK UU MD3

DPR Siap Patuhi Hasil Putusan Uji Materi di MK

JAKARTA - Pimpinan DPR memastikan akan menjalankan apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi tentang Undang-Undang No 3 Tahun 2018 MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Putusan MK dianggap sebagai jalan terbaik dalam menyikapi pro-kontra UU MD3 yang terjadi di masyarakat.

"DPR saat ini menunggu hasil MK. Apakah UU MD3 tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kami akan menerima apapun keputusan MK," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsot) di sela acara sosialisasi UU MD3 di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, saat ini se-

bagian masyarakat telah berburuk sangka terhadap sebagian dari UU MD3. Mereka memandang UU MD3 hanyalah untuk kepentingan sesaat dari para anggota DPR. Oleh karena itu apa pun keputusan MK terhadap UU tersebut menjadi jalan terbaik untuk bisa diterima semua pihak. "Karena percuma juga kalau kami ubah, sebagian masyarakat telanjur terprovokasi dan telanjur su-uzon atau berburuk sangka. Jadi, ya lebih baik DPR menunggu saja hasil uji materi di MK," katanya.

Bamsot menjelaskan, UU MD3 dibutuhkan agar DPR memiliki kekuatan melaksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat untuk melaksanakan fungsi

legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah. Apalagi saat ini besaran APBN yang harus dikelola oleh pemerintah telah mencapai Rp2.000 triliun. "Apakah amanat yang diberikan rakyat kepada pemerintah telah dijalankan secara sungguh-sungguh atau tidak. Apakah APBN yang telah mencapai Rp2.000 triliun lebih itu digunakan tepat sasaran atau tidak," ungkapnya.

Mantan anggota Komisi III itu memastikan DPR tetap menerima kritik dan tidak membentengi diri dengan menggunakan UU MD3 tersebut. Dia menjamin tidak akan ada masyarakat yang mengkritisi DPR, kemudian diproses secara pidana dengan pasal-pasal di UU

MD3 tersebut.

"Saya selaku pimpinan DPR menjamin tidak akan ada warga yang diproses hukum karena mengkritik DPR. Karena memang bukan itu dari tujuan UU MD3," katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan berlakunya UU MD3 tidak memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Dia justru khawatir ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi sehingga ada kesan bahwa UU MD3 sebagai ancaman demokrasi. "Karena sebenarnya kan DPR menjadi hebat karena diawasi oleh rakyat. Makanya kritik itu justru sangat diharapkan karena itulah vitamin bagi DPR. Yang tidak boleh adalah me-

nyebarkan ujaran kebencian dan fitnah," ucapnya.

Bamsot juga yakin masyarakat Indonesia sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi. Karenanya, dalam menyampaikan pendapat, masyarakat sudah bisa memfilter mana kritik membangun dan mana berita bohong, hoax ataupun ujaran kebencian.

"Kita tentu tidak ingin bangsa ini asyik bergumul saling membenci dan memfitnah satu sama lain. Jadi silakan kritik DPR karena dari situlah akan ada masukan dan perkembangan," tegasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, berlakunya UU MD3 tanpa tanda tangan Pre-



Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) bersama pengacara kondang Hotman Paris saat melakukan sosialisasi UU MD3 di kawasan Jakarta Utara, kemarin.

siden Joko Widodo (Jokowi) memang menugasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk membahasnya dengan DPR. Sebab dalam prosesnya pemerintah dalam hal ini Presiden

© rahmat sahid